

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Parks, Alex. L, 1982, *The Law of Tug, Tow and Pilotage*, Chapman and Hall, London
- Rose, Francis, 1984, *The Modern Law of Pilotage*, Sweet & Maxwell, London.
- Soekanto Soerjono, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja
- A.G. Corbert, 1990, *The Law of Pilotage, The Nautical Institute on Pilotage and Shiphandling*, London.
- Hadari Nawawi dan Mimi Martini, 1994 *Penelitian Terapan*, UGM Press, Yogyakarta
- Sunggono, Bambang, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta,
- Soemardjono, Maria S.W, 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kramadibrata, Soedjono, 2002, *Perencanaan Pelabuhan*, ITB, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Triatmodjo, Bambang, 2009, *Perencanaan Pelabuhan*, Beta Offset, Yogyakarta
- Surachman Eka Nur, Suhendra Maman, Prabowo Sakti, Handayani Dian, 2020, *Dinamika Penyiapan Proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha di Indonesia*, PT. Elex Media Komputindo.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Varnavskiy, V. G., Klimenko, A. V. & Korolev, V. A. ,2010. *Public-private partnership: theory and practice*. Moscow: Nauka

Lasse, D.A., 2011, *Manajemen Kepelabuhanan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, *Keselamatan Pelayaran di Lingkungan Teritorial Pelabuhan dan Pemanduan Kapal*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Martono H.K., Tjahjono Eka Budi, 2011, *Transportasi di Perairan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Abubakar Iskandar, Kenasin Herdjan, Barzach B., 2013, *Suatu Pengantar Pelayaran Perairan Daratan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

E. Fernando M. Manullang dkk, 2016 *Selayang Pandang Sistem Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Asshiddiqie Imly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hal 154-162 sebagaimana dikutip oleh Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi dalam *Modul Pendidikan Negara Hukum Dan Demokrasi*, Mahkamah Konstitusi, April 2016

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, 2020, *Tol Laut Konektivitas Visi Poros Maritim*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta

Studi Kelayakan Pengelolaan Alur Pelayaran Sungai Barito Provinsi Kalimantan Selatan PT.Ambapers

Public Private Partnership in Selected Countries: *A Comparative Analysis*, Bekir Parlak and Abdullahi Suleiman Hashi, *Faculty of Economics and Administrative Sciences Bursa Uludag University, Turkey*

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

Ordonansi Kapal Tahun 1935 (Scheepen Ordonnantie Staatsblad Tahun 1935 Nomor 66), beserta peraturan pelaksanaannya.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1964 tentang Pembinaan Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan dan Daerah Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 49).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1969 tentang Susunan dan Tata Kerja Kepelabuhanan dan Daerah Pelayaran (Lembaran Negara Dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1969 Yang Telah Dicitak Ulang).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983 tentang Pembinaan Kepelabuhanan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1985 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3290)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan. . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145).

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070).

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093).

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108)

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533).

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5731)

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja sama Pemerintah Dengan
Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6841)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu
Navigasi-Pelayaran

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2011 tentang
Telekomunikasi-Pelayaran

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 985)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 129 Tahun 2016 tentang Alur
Pelayaran di Laut di Laut dan Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 688)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2021 tentang Konsesi dan
Kerjasama Bentuk Lainnya Antara Penyelenggara Pelabuhan Dengan
Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Pelayaran (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 690)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara
Pemberian Konsesi dan Kerjasama Melalui Mekanisme Pelelangan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 248)

Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor Kp-DJPL 415 Tahun 2022 tentang Standar Dokumen dan Pedoman Evaluasi Serta Penilaian Dokumen Kajian Kelayakan Konsesi atau Kerja Sama Dalam Pengusahaan Alur Pelayaran Atas Prakarsa Badan Usaha Pelabuhan, Badan Usaha Pengerukan dan Reklamasi dan/atau Badan Usaha Patungan Antara Badan Usaha dan Badan Usaha Pengerukan dan Reklamasi

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Raplin Halid, “Implementasi Perjanjian Konsesi Kepelabuhanan Di PT Pelabuhan Indonesia (IV) Persero” *Tesis pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada Tahun 2021*, Makassar.

Yulia Kurniawan “Pelaksanaan Perjanjian Konsesi Terminal Petikemas Kalibaru Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran” *Tesis pada Magister Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Tahun 2017*, Yogyakarta.

Hikmahanto Juwana dan tim, “Naskah Akademik Tentang Ratifikasi Konvensi PBB Mengenai Kontrak Jual Beli Barang Internasional”, (Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI: Jakarta, 2013), 67, diakses pada tanggal 22 Januari 2022, https://www.bphn.go.id/data/documents/na_bbm.pdf

Diana Tantri Cahyaningsih, “Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot”, *Jurnal Rechtsvinding Online* (Media Pembinaan Hukum Nasional: 27 Maret 2020), yang diakses pada tanggal 19 Januari 2021, [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Mengurai%20Teori%20Effectiveness%20of%20Law%20%20Anthony%20Allot%20\(Final\).pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Mengurai%20Teori%20Effectiveness%20of%20Law%20%20Anthony%20Allot%20(Final).pdf)

Jan Torpman and Fredrik Jörgensen. “Legal Effectiveness: Theoretical Developments on, Legal Transplants” dalam <http://www.jstor.org/stable/23681578> Source: ARSP: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie/Archives for Philosophy of Law and Social Philosophy,

Vol. 91, No. 4 (2005), h. 523, 526-527, sebagaimana dikutip oleh Slamet Yuswanto, “Efektivitas Ketentuan HKI Terdaftar Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba”, dalam Jurnal Legislasi Indonesia Vol.15 No.3 – November 2018, 129-143, <https://doi.org/10.54629/jli.v15i3.233>

Internet

<http://www.pppindiadatabase.com/>